

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menyajikan mengenai tinjauan pustaka yang menjadi dasar kerangka pemikiran dari pengajuan dalam hipotesis. Beberapa hal yang akan disajikan dalam bab ini yaitu mencakup tinjauan yang menjelaskan beberapa teori yang menggambarkan konsep dari variabel yang akan diteliti serta pembahasan tentang penelitian yang terdahulu sebagai bahan perbandingan dalam melakukan suatu penelitian. Berikutnya, akan ditulis kerangka pemikiran untuk dapat menjelaskan seperti apa model dan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Bahasan terakhir dari bab ini adalah hipotesis mengenai penelitian yang diajukan.

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan

Secara etimologis kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti tidak berharta benda juga serta kekurangan. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak. Kemiskinan adalah salah satu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar hidup secara ekonomi masyarakat disuatu daerah. Fenomena ini biasa terjadi karena rendahnya pendapatan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Rendahnya penghasilan akan menyebabkan kurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup seperti standar kesehatan

dan pendidikan. Masalah kemiskinan sangat sering terjadi di beberapa negara yang sedang berkembang dengan tingkat penduduk yang tinggi sehingga terjadi ketidakmerataannya kesejahteraan masyarakat yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial antar masyarakat. Penduduk miskin tidak hanya hidup dengan kekurangan uang atau tingkat pendapatan yang rendah, melainkan tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, mendapatkan perlakuan ketidakadilan dalam hukum dan rentan terhadap timbulnya ancaman tindak kriminal (Rafil, 2019).

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis kemiskinan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002).

2.1.1.2 Teori Kemiskinan

Menurut Suharto (2009) mengatakan bahwa teori neo liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes (1688), John Locke (1689) dan John Stuart Mill (1859) yang intinya menyerukan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Teori ini mengatakan bahwa para pendukung neo liberal berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan-pilihan

individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara langsung strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat “residual”, sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Peran negara hanyalah sebagai “penjaga malam” yang harus boleh ikut campur manakala lembaga-lembaga di atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya. Penerapan program-program *structural adjustment*, seperti program Jaringan Pengaman Sosial (JPS).

Menurut Pinontoan (2020) mengemukakan teori demokrasi sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Demokrasi sosial menekankan keseimbangan antara peran pasar dan negara dalam menyediakan layanan sosial serta perlindungan bagi kelompok rentan. Menurut Esping-Andersen (2021), negara harus aktif dalam mengurangi ketimpangan sosial melalui redistribusi sumber daya dan penyediaan layanan dasar. Demokrasi sosial melihat pengangguran sebagai masalah struktural yang disebabkan oleh kurangnya intervensi pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, yang berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kemiskinan. Upah minimum yang tidak memadai juga dapat membuat pekerja tetap berada dalam garis kemiskinan, sehingga demokrasi sosial menekankan pentingnya upah layak untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, keterbatasan kesempatan kerja menciptakan ketimpangan ekonomi, sehingga diperlukan kebijakan publik yang mendorong penciptaan lapangan kerja yang

inklusif. Implementasi demokrasi sosial dalam mengurangi kemiskinan terlihat dalam program bantuan sosial seperti program bidang kesehatan, program bidang pendidikan, program perlindungan sosial, dan program bidang Pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Menurut Harahap et al., (2024) negara-negara Skandinavia yang menganut model demokrasi sosial menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan sistem kesejahteraan dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma demokrasi sosial tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan. Dalam jangka panjang, kebijakan berbasis demokrasi sosial bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap individu memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, program-program sosial yang berbasis pada prinsip redistribusi dan perlindungan sosial memiliki dampak yang lebih berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

2.1.1.3 Bentuk Kemiskinan

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk pemasalahan multidimensional, menurut Chambers dalam Tjiabrata et al (2021) kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk yaitu:

1. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi karena pendapatan seseorang tersebut berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak

mampu memenuhi kebutuhan standar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang dibutuhkan agar kualitas hidupnya meningkat.

2. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya kebijakan pembangunan yang tidak merata sehingga mengakibatkan ketimpangan pendapatan atau ketimpangan kesejahteraan di suatu daerah tersebut. Daerah tersebut biasanya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya perilaku dan kebiasaan masyarakat yang berasal dari budaya atau adat istiadatnya yang enggan untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan tata cara modern. Kebiasaan tersebut berupa sikap malas, tidak hemat, tidak memiliki inovasi, dan hidupnya relatif bergantung pada orang lain.

4. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi karena masyarakat tidak dapat menggunakan sumber daya yang berada di wilayahnya karena telah dikuasai oleh orang lain.

2.1.1.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemiskinan

Menurut Annur (2013) dalam teori yang dikemukakan oleh Hartono dan Aziz ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kemiskinan yaitu:

1. Pendidikan yang terlampau rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menjadikan seseorang kurang dalam hal keterampilan tertentu yang diperlukan untuk kehidupannya. Keterbatasan

pendidikan dan keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2. Malas bekerja

Dengan adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak ada gairah untuk bekerja.

3. Keterbatasan sumber alam

Sumber daya alam yang tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka akan menyebabkan masyarakat dilanda kemiskinan. Hal ini sering dikaitkan dengan masyarakat miskin karena sumber daya alamnya yang miskin.

4. Terbatasnya lapangan pekerjaan

Keterbatasan lapangan pekerjaan akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Karena idealnya seseorang harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru sedangkan hal tersebut kecil kemungkinannya bagi masyarakat yang miskin karena terbatasnya modal dan keterampilan.

5. Keterbatasan modal

Mereka yang tidak memiliki modal untuk mengasah keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan adalah penyebab seseorang miskin.

6. Beban keluarga

Seseorang yang memiliki anggota keluarga yang banyak jika tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menyebabkan kemiskinan, karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin banyak tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2.1.2 Pengangguran

Pengangguran dan kemiskinan terjadi karena perbandingan antara kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga. Kesenjangan antara jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja ini perlu kita pikirkan, lebih-lebih untuk tenaga kerja yang tidak terdidik, tidak terampil, dan atau tenaga kerja berpendidikan rendah. Bila tidak tertampung di lapangan kerja formal, jalan satu-satunya adalah dengan membekali mereka keterampilan berwirausaha agar mereka dapat memperoleh penghasilan dan mencapai kesejahteraan

2.1.2.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seorang anggota angkatan kerja menginginkan pekerjaan tetapi tidak dapat memperolehnya (Sukirno, 2006). Menurut Lavenia et al., (2023) dalam teori yang dikemukakan oleh Mankiw, pengangguran merupakan masalah ekonomi makro paling serius yang secara langsung dapat merugikan manusia. Pengangguran mencakup mereka yang aktif mencari pekerjaan, mereka yang tidak aktif mencari pekerjaan karena merasa tidak mampu, dan mereka yang mempersiapkan diri untuk berbisnis.

Menurut Sadono, S. (2004), hilangnya pendapatan akibat pengangguran berdampak buruk pada taraf hidup masyarakat. Jika kondisi kehidupan masyarakat memburuk karena pengangguran, mereka lebih mungkin jatuh ke dalam kemiskinan. Kerusuhan politik dan sosial tidak dapat dihindari di negara-negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi, dan hal itu berdampak buruk pada kesejahteraan sosial dan prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Para investor pun akan berfikir dua kali jika ingin menanamkan modalnya di daerah tersebut karena melihat sumber daya manusianya yang kurang berkualitas.

2.1.2.2 Jenis Pengangguran

Menurut Mankiw (2006) dalam buku Pengantar Ekonomi Makro edisi kedua, menggolongkan pengangguran menjadi 5 bentuk, yaitu:

1. Pengangguran terbuka (*open unemployment*)

a. Penganggur sukarela

Pengangguran sukarela merupakan kelompok angkatan kerja yang memilih tidak bekerja karena tidak bersedia digaji pada jumlah tertentu maupun mengharapkan pekerjaan yang lebih baik.

b. Penganggur terpaksa

Pengangguran terpaksa merupakan kelompok angkatan kerja yang bersedia bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

2. Setengah penganggur (*underemployment*)

Tenaga kerja yang termasuk setengah menganggur adalah kelompok tenaga kerja yang lamanya bekerja (dalam satuan hari, jam, ataupun minggu) kurang dari yang seharusnya mereka bisa kerjakan. Misalnya orang yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi orang tersebut malas-malasan, datang terlambat, maupun mendahului pulang.

3. Bekerja secara tidak penuh

a. Pengangguran Tak Kentara (*disguised unemployment*)

Contoh pengangguran tak kentara adalah petani yang bekerja di sawah selama sehari penuh dari pagi sampai sore. Bila dilihat dari jumlah pekerjaan

yang harus dikerjakan di sawah, pekerjaan tersebut tidaklah perlu dilakukan sehari penuh, melainkan cukup setengah hari saja.

b. Pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*)

Penyebab pengangguran tersembunyi adalah orang yang bekerja tidak sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikannya sehingga orang tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal.

c. Pensiun awal

Pensiun awal memiliki tujuan tertentu, misalnya untuk memberi kesempatan tenaga kerja baru yang memiliki pemikiran yang lebih aplikatif maupun mengurangi tenaga kerja tua yang produktivitasnya mulai menurun.

4. Tenaga kerja lemah

Kelompok ini sebenarnya memiliki pekerjaan dan bekerja secara penuh, tetapi intensitasnya rendah. Jenis pengangguran ini dikarenakan kurang gizi maupun menderita penyakit tertentu.

5. Tenaga kerja tidak produktif

Kelompok angkatan kerja ini sebenarnya sudah memiliki pekerjaan dan mampu bekerja secara produktif, tapi karena kurangnya fasilitas yang dimiliki perusahaan mengakibatkan mereka menghasilkan pekerjaan yang tidak memuaskan. Misalnya mesin yang dimiliki sudah usang, kondisi pabrik yang tidak nyaman, maupun bahan baku yang tidak tersedia secara rutin.

Menurut Ritonga et al., (2021) dalam teori yang dikemukakan oleh Sukirno, pengangguran yaitu suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong pada kategori angkatan kerja atau tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedangkan

mencari pekerjaan. Berdasarkan jenis pengangguran pada tinjau dari interpretasi ekonomi diantaranya dapat berupa hal-hal berikut:

1. Pengangguran friksional (*frictional unemployment*)

Pengangguran yang ditimbulkan adanya asa pekerja buat mencari pekerjaan yang baik lebih baik atau lebih sinkron. Pengangguran ini diklaim jika pengangguran *everyday* serta tidak disebut sebagai masalah yang berfokus dua.

2. Pengangguran struktural (*structural unemployment*)

Pengangguran yang ditimbulkan adanya perubahan atau perkembangan teknologi pada kegiatan ekonomi, sebagai akibatnya terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki menggunakan yg dibutuhkan lapangan kerja.

3. Pengangguran siklikal (*cyclical unemployment*)

Pengangguran yang ditimbulkan adanya fluktuasi/siklus pada perkembangan bisnis atau dikarenakan oleh kemerosotan perekonomian suatu negara. Kemerosotan ekonomi bisa berasal dari pada negeri dan bisa pula berasal luar negeri, seperti; konsumsi, investasi, dan ekspor.

4. Pengangguran musiman (*seasonal unemployment*)

Pengangguran yang dipengaruhi oleh perubahan demam isu, umumnya bersifat ad interim dan terjadi pada jangka pendek secara berulang-ulang.

2.1.2.3 Teori Pengangguran

Terkait pengangguran, ada banyak teori dan pendapat dari beberapa ahli ekonomi mengenai pengertian pengangguran. Berikut beberapa teori dari para ahli ekonomi yang mengemukakan pendapat mengenai pengangguran diantaranya:

1. Teori Keynes

Menurut teori Keynes (1936), masalah pengangguran terjadi diakibatkan oleh permintaan agregat (permintaan keseluruhan) yang rendah sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi dalam masyarakat. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun yang berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang yang pada akhirnya akan mengakibatkan produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pasar bebas karena diperlukan keikutsertaan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat. Pemerintah dalam hal ini hanya bertugas mengendalikan dan sektor swasta yang menyediakan lapangan kerja, yang bertujuan untuk mempertahankan pendapatan masyarakat agar tidak membawa resesi lebih dalam sehingga tidak menimbulkan pengangguran baru.

2. Teori kependudukan dari Malthus

Malthus (1820) memandang penyebab pengangguran disebabkan oleh pertumbuhan populasi manusia yang cenderung melampaui pertumbuhan stok makanan. Menurut Malthus, penduduk cenderung tumbuh secara “deret ukur” (misalnya, 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan cenderung tumbuh secara “deret hitung” (misalnya, dalam deret 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya) yang berarti pertumbuhan penduduk lebih cepat berkali-kali lipat dari persediaan makanan. Dari uraian di atas, Malthus menyimpulkan bahwa pertumbuhan populasi manusia yang tidak diimbangi dengan stok makanan akan terjerumus ke dalam kemiskinan.

2.1.2.4 Penyebab Pengangguran

Menurut Mankiw (2006) dalam buku Pengantar Ekonomi Makro edisi kedua, ada beberapa penyebab kemiskinan yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi masalah pembangunan yang serius apabila penduduk tersebut tidak memiliki keahlian dan perekonomian tidak mampu menyerapnya di pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan kemampuan perekonomian menyediakan lapangan pekerjaan akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Pertumbuhan penduduk di negara berkembang yang lebih tinggi daripada negara maju merupakan salah satu pemicu terjadinya pengangguran, selain kemampuan negara maju yang mampu menyediakan kesempatan kerja bagi penduduknya. Dilihat dari pola perkembangannya di masa datang, pertumbuhan penduduk di negara berkembang akan mengalami penurunan.

2. Rendahnya laju investasi produktif

Rendahnya investasi di negara berkembang merupakan salah satu penyebab rendahnya kesempatan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Meskipun sumber daya alam yang dimiliki melimpah, tetapi kapasitas produksi dan sumber daya yang ada belum digunakan secara penuh (*underemployment*) sehingga terjadi *idle capacity*.

3. Siklus bisnis yang melimpah

Dalam siklus bisnis, ada gelombang fluktuasi kegiatan ekonomi secara umum yang dikenal sebagai gelombang konjungtur. Siklus bisnis secara aktual

diukur dari GNP riil yang merupakan nilai pasar dari barang dan jasa yang dihasilkan selama satu tahun. Pada saat puncak kegiatan bisnis (*peak*), kebutuhan akan tenaga kerja sangat besar sehingga pada kondisi ini jumlah pengangguran relatif rendah. Setelah kondisi puncak, siklus bisnis mengalami kelesuan dan pada kondisi puncak kelesuan (*trough*) kebutuhan akan tenaga kerja sangat sedikit, sehingga tenaga kerja yang ada tidak dipekerjakan sehingga mengalami pengangguran. Ada kalanya pengangguran semacam ini bersifat hanya sementara saja selama kondisi siklus bisnis mengalami kelesuan.

4. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat

Pengangguran dapat terjadi karena masyarakat tidak mampu memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia. Ketidakmampuan dalam memanfaatkan kesempatan kerja tersebut, salah satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian keahlian yang dibutuhkan dengan keahlian tenaga kerja yang dimiliki. Di sebagian negara berkembang, rendahnya keahlian angkatan kerja dikarenakan rendahnya kualitas pendidikan yang diperoleh masyarakat. Dengan demikian, kesempatan kerja yang tersedia itu akan dimanfaatkan oleh tenaga kerja yang berasal dari luar daerah tersebut, atau bahkan dari luar negeri. Pengangguran yang terjadi disebabkan karena rendahnya kualitas pendidikan dari angkatan kerja yang bersangkutan, maka cara untuk mengatasinya adalah dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal.

5. Strategi industri yang *labor saving*

Kemajuan teknologi yang terjadi di satu sisi mengakibatkan meningkatnya jumlah output yang mampu dihasilkan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, kemajuan teknologi kadang juga diikuti dengan penghematan penggunaan tenaga kerja (*labor saving*) pada suatu proses produksi dan menggunakan modal secara intensif (*capital intensive*) yang pada akhirnya akan menimbulkan pengangguran.

2.1.3 Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah minimum kabupaten/kota (UMK) adalah standar gaji terendah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk melindungi pekerja dari upah yang tidak layak. UMK ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan biaya hidup di masing-masing kabupaten atau kota, melibatkan diskusi antar pemerintah, perwakilan pekerja, dan pengusaha. Penetapan UMK bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

2.1.3.1 Pengertian Upah Minimum

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman. Sedangkan upah minimum provinsi merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Upah minimum sendiri memiliki tujuan agar kualitas penduduk yang berpendapatan rendah menjadi lebih baik. Adanya peningkatan upah minimum akan menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat, sehingga kesejahteraan pun meningkat (Ayu & Faisal, 2021).

Menurut Faadihilah et al., (2023) dalam teori yang dikemukakan oleh golongan klasik baru yang berpendapat bahwa upah nominal akan selalu berubah

sejalan dengan perubahan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja. Menurut golongan Keynes baru, upah dalam pasar ditentukan melalui perjanjian kontrak antara pekerja dan majikan atau perusahaan, dan tidak akan dipengaruhi oleh fluktuasi dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja yang berlaku. Dengan kata lain, upah cenderung tetap pada tingkat yang telah disepakati dalam kontrak antara tenaga kerja dan majikan atau perusahaan. Penurunan permintaan tenaga kerja tidak akan menyebabkan penurunan upah nominal, dan sebaliknya, peningkatan permintaan tenaga kerja tidak akan segera meningkatkan upah nominal.

Selama kontrak kerja antara tenaga kerja dan majikan tetap berlaku, upah akan tetap konstan, meskipun tidak ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar (Sukirno, 2003). Upah memiliki dua perspektif yang berbeda, Dari sudut pandang produsen, upah dianggap sebagai biaya yang harus dibayarkan kepada pekerja dan merupakan bagian dari biaya total produksi. Namun, dari sudut pandang pekerja, upah dianggap sebagai pendapatan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan tenaganya oleh produsen.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Upah

Menurut Zaeni (2007) terdapat beberapa jenis upah yaitu sebagai berikut:

1. Upah nominal

Upah nominal merupakan upah yang diterima oleh para pekerja secara tunai yang berhak diterima sebagai imbalan atas jasa-jasanya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

2. Upah nyata

Upah nyata merupakan kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.

3. Upah hidup

Upah hidup merupakan upah yang diterima oleh para pekerja yang relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan lain-lain.

4. Upah minimum

Upah minimum merupakan upah terendah yang dijadikan standar oleh perusahaan untuk menentukan upah para pekerja yang bekerja di perusahaannya.

Upah minimum ini umumnya ditentukan setiap tahun oleh pemerintah.

5. Upah wajar

Upah wajar merupakan upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja sebagai imbalan atas jasa-jasanya terhadap perusahaan.

Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antar upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faktor yang memengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Kondisi perekonomian negara;
- b. Nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada;
- c. Peraturan perpajakan;
- d. Standar hidup para pekerja/buruh itu sendiri;
- e. Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

2.1.3.3 Teori Upah

Menurut Burt (1963) dalam bukunya yang berjudul “*Labor Market and Government Policies*” mengatakan bahwa terdapat beberapa teori pengupahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Teori upah menurut pertambahan produk marginal

Teori neo klasik mengatakan bahwa pekerja akan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah disini berfungsi sebagai imbalan atas jasa-jasa yang telah dilakukan pekerja terhadap pengusaha. Upah dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan jasa-jasa (produktivitas) yang diberikan oleh pekerja. Jadi dapat disimpulkan artinya pada teori ini upah didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil faktor produksi. Dimana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima pengusaha dari pekerja.

2. Teori upah menurut kebutuhan hidup

Teori upah menurut kebutuhan hidup merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teori ini mendasarkan gagasannya yang berpandangan bahwa harga suatu kerja “upah” pada hakikatnya adalah pengeluaran kerja. Maka dari itu upah harus sesuai dengan harga kebutuhan-kebutuhan pokok pekerja yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, jika tingkat upah naik di atas biaya hidup minimum pekerja, maka akan meningkatkan penawaran tenaga kerja dan menyebabkan tingkat upah menurun.

2.1.4 Kesempatan Kerja

Kebutuhan tenaga kerja (kesempatan kerja) adalah jumlah lapangan kerja dalam satuan orang yang dapat disediakan oleh seluruh sektor ekonomi dalam

kegiatan produksi. Dalam arti yang lebih luas, kebutuhan ini tidak hanya menyangkut jumlahnya, tetapi juga kualitasnya (pendidikan atau keahliannya). Kesempatan kerja memberikan informasi jumlah lapangan kerja yang tersedia. Berbagai kegiatan ekonomi di berbagai lapangan usaha dapat menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu memberikan kesempatan kepada penduduk untuk bekerja (Agusalim, 2022).

2.1.4.1 Indikator Kesempatan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik untuk mengukur dan mengetahui kesempatan kerja suatu daerah dapat di lihat melalui angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja.

2.1.4.2 Teori Kesempatan Kerja

Model kesempatan kerja dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu dari teori klasik dan teori Keynes. Teori klasik mengemukakan pandangan mereka mengenai kesempatan kerja, yaitu bahwa tingkat output dan harga keseimbangan hanya bisa dicapai kalau perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*). Sementara, keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja penuh (*equilibrium with full employment*) hanya bisa dicapai melalui bekerjanya mekanisme pasar bebas. Jadi, adanya mekanisme pasar yang bekerja

secara bebas tanpa campur tangan pemerintah itu merupakan necessary condition bagi tercapainya keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh. Keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh tersebut menurut kaum klasik merupakan kondisi yang ideal atau normal dari suatu perekonomian. Jika sampai terjadi pengangguran di dalam perekonomian, maka hal tersebut hanyalah gejala atau fenomena yang bersifat sementara, bahwa dalam jangka panjang akan hilang dengan sendirinya melalui bekerjanya secara bebas mekanisme pasar. Kesempatan kerja menurut pandangan Keynes, berbeda dengan klasik. Menurut Keynes, kegiatan perekonomian tergantung pada segi permintaan, yaitu tergantung kepada perbelanjaan atau pengeluaran agregat yang dilakukan perekonomian pada suatu waktu tertentu. Diartikan dengan pengeluaran agregat adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sesuatu perekonomian dalam suatu periode tertentu, dan hanya bisa diukur untuk suatu tahun tertentu (Elvandry et al, 2015).

2.1.4.3 Pengertian Ketenagakerjaan

Tenaga kerja (sumber daya manusia) merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah ketenagakerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (Frete, 2020).

2.1.4.4 Teori Ketenagakerjaan

Menurut Mulyadi (2017) dalam teori Lewis (1959) mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang. Sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal. Sektor ini mempunyai kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah relatif murah daripada sektor kapitalis modern. Lebih murah biaya upah pekerja asal pedesaan akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlansungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran pekerja di sektor subsisten terbelakang akan diserap.

Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan/ketimpangan tingkat pendapatan antara perkotaan dan pedesaan. Menurut Lewis (1959), adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi terlalu banyak.

2.1.5 Bantuan Sosial

2.1.5.1 Pengertian Bantuan Sosial

Berdasarkan Perpres nomor 63 tahun 2017 bantuan sosial ialah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin, masyarakat kurang mampu, ataupun masyarakat rentan terhadap resiko sosial, dimana bantuan yang diberikan berupa uang, barang, ataupun jasa dimana bantuan sosial ini merupakan program yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan (JDIH, 2017).

Bansos dikucurkan melalui anggaran negara (APBN/APBA), bantuan ini diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas yang secara ekonomi, lemah dan kelayakan untuk menerimanya diuji terlebih dahulu dengan tes kemiskinan. Bansos ini dapat bersifat sementara atau bersifat berkelanjutan. Bantuan sosial sementara adalah pemberian bantuan yang tidak harus setiap tahun anggarannya diberikan dan dapat diberhentikan apabila penerima bantuan sosial telah lepas dari risiko sosial, sehingga tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berkelanjutan adalah bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial serta upaya untuk mengembangkan kemandirian (Alba & Kurniawan, 2019).

Bantuan sosial juga merupakan program jaminan perlindungan yang bertujuan untuk meminimalkan kerentanan ekonomi rumah tangga miskin. Tujuan jangka pendek dari program bantuan sosial adalah untuk membantu meringankan tanggungan pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin, sementara itu tujuan jangka panjang diberlakukan program bantuan sosial agar dapat mengentaskan

permasalahan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan (Agustin, 2022).

2.1.5.2 Teori Bantuan Sosial

Teori dari Rostow dan Musgrave (1960) menjelaskan bahwa belanja publik untuk pembangunan ekonomi dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjutan (Nahumuri, 2019). Pada tahap awal, pemerintah berinvestasi secara signifikan dalam mendanai infrastruktur pendidikan, dan kesehatan. Tahap menengah, investasi pemerintah ditujukan pada pertumbuhan ekonomi. Tahap lanjutan pengeluaran pemerintah akan difokuskan pada kegiatan sosial seperti program kesejahteraan masyarakat.

2.1.5.3 Jenis-Jenis Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) berdasarkan dana APBN dikelompokkan menjadi empat bidang, yaitu:

1. Bidang Pendidikan

a. Program dana bantuan operasional sekolah (BOS)

BOS adalah dana yang digunakan yang utama yaitu untuk mendanai belanja yang bukan untuk personalia untuk santun pendidikan, seperti pemeliharaan sarana serta prasarana sekolah hingga pembelian alat multimedia untuk dapat menunjang kegiatan belajar mengajar.

b. Beasiswa pendidikan/mahasiswa miskin

Beasiswa pendidikan adalah bantuan biaya sehingga seorang pelajar dapat mengikuti kegiatan untuk belajar dengan biaya yang ringan atau bisa juga tanpa biaya karena beasiswa bersifat bantuan, penerimaan beasiswa jumlahnya

berbeda-beda dapat berupa beasiswa penuh, beasiswa sebagian atau bantuan fasilitas tertentu yang dapat menunjang pembelajaran.

2. Bidang Kesehatan

Bantuan sosial dalam Bidang kesehatan banyak namanya sesuai dengan program pemerintahan yang dilaksanakan namun tujuannya manfaatnya sama yaitu untuk membantu masyarakat kurang mampu atau miskin dan tatacaranya sama yang membedakan cuman namanya saja, seperti:

- a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan kesehatan pada saat pemerintahan presiden SBY, dengan program JKN ini berharap agar seluruh warga negara indonesia berharap bisa mendapatkan jaminan JKN ini dapat hidup sehat, sejahtera serta hidup produktif.
 - b. Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah jaminan kesehatan yang diberikan masa pemerintahan jokowi sebenarnya tidak beda jauh dengan JKN, Jaminan kesehatan Masyarakat (jamkesmas).
3. Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan mencakup Kecamatan (PPK) mencakup P2KP, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Pedesaan/PPIP, PNPM Daerah Tertinggal/PDT, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).
4. Dalam Bidang Perlindungan Sosial, meliputi:

a. Program Keluarga Harapan/PKH

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (DirjenPerlindungan dan JaminanSosial: 2017). Program Keluarga Harapan (PKH) pada intinya

membantu keluarga miskin agar memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan.

b. Bantuan Langsung Tunai/BLT

Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut (Indah, 2021).

c. Beras Sejahtera/Rastra

Program Rastra adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah, yaitu mereka yang termasuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Dengan pemberian subsidi tersebut, masyarakat diharapkan bisa membeli beras dengan harga terjangkau (TNP2K, 2018).

d. Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT

BantuanPangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akunelektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE Program Keluarga Harapan (PKH)/pedagang bahan

pangan yang bekerja sama dengan Bank HIMBARA (Himpunan Bank Rakyat) (Suarni et al., 2022).

2.1.5.4 Risiko Permasalahan Bantuan Sosial

1. Proses penyaluran bansos tidak jelas dan tidak transparan.

Salah satu indikasinya adalah tidak adanya standar prosedur operasi untuk proses penyaluran belanja bansos baik kriteria penerima maupun jumlah nominal yang akan disalurkan. Penyaluran dilakukan secara spontan sesuai dengan arahan pimpinan.

2. Penerima bantuan sosial fiktif

Belanja bantuan sosial fiktif ini terjadi apabila uang belanja bantuan sosial telah dicairkan dan tercatat keluar dari kas daerah, namun tidak diterima oleh pemohon yang seharusnya menerima. Kasus ini seringkali terjadi pada belanja bantuan sosial yang pembayarannya dilakukan secara tunai.

3. Penerima bantuan sosial tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial

Belanja bantuan sosial fiktif ini terjadi apabila uang belanja bantuan sosial telah dicairkan dan tercatat keluar dari kas daerah, namun tidak diterima oleh pemohon yang seharusnya menerima. Kasus ini seringkali terjadi pada belanja bantuan sosial yang pembayarannya dilakukan secara tunai.

4. Bantuan sosial tidak digunakan sesuai peruntukan

Permasalahan ini terjadi dalam hal uang bantuan sosial tersebut tidak digunakan sesuai dengan rencana penggunaan yang dimuat dalam proposal permohonan bantuan sosial. Misalnya, rencana penggunaan bantuan sosial adalah untuk pengobatan, namun digunakan untuk foya-foya.

5. Pemotongan dana bansos atau pemberian *fee* untuk pihak yang telah membantu

Proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan belanja bansos memerlukan proses yang berbelit menurut sebagian orang. Hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum petugas maupun masyarakat yang mempunyai akses terhadap kekuasaan untuk mengawak usulan nama-nama penerima bantuan sosial dengan harapan mendapatkan keuntungan materi mau dengan memotong maupun meminta *fee* kepada penerima bansos.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Bab ini akan membahas beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Tujuan dari peneliti-peneliti terdahulu adalah sebagai referensi dalam penelitian dan memperkuat hasil analisis, adapun beberapa penelitian-penelitian tersebut yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rafi Taufiq & Moh. Athoillah (2023) Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia,	• Pengangguran • tingkat partisipasi angkatan kerja • Upah Minimum	• Bantuan Sosial	• Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. • Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan memiliki pengaruh signifikan positif.	<i>Journal Of Development Economics And Social Studies</i> Vol. 2 No 2 Tahun 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Tapal Kuda			• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap kemiskinan memiliki pengaruh signifikan negatif • Upah Minimum terhadap kemiskinan berpengaruh signifikan negatif. • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan memiliki pengaruh signifikan negatif. • Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan memiliki pengaruh signifikan positif. • Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan memiliki pengaruh signifikan positif.	
2.	Ghazy Faden Faadihilah (2023) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bekasi	• Upah Minimum	• Pengangguran • Kesempatan Kerja • Bantuan Sosial	• Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan. • Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan. • Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan. • Pertumbuhan ekonomi, IPM, dan Upah minimum berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan.	JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) E-ISSN: 2579-5635, P-ISSN: 2460-5891 Vol. 9 (5) Oktober Tahun 2023
3.	Lulut Lavenia, Syafri Mandai, dan Muhammad Yudhi Lutfi (2023) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk Dan Angka Melek Huruf	• Upah Minimum • Pengangguran	• Kesempatan Kerja • Bantuan Sosial	• PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan • upah minimum memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan • Pengangguran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan • Jumlah penduduk memengaruhi kemiskinan secara positif signifikan • angka melek huruf memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Ekonomi Trisakti https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet Vol. 3 No. 1 April 2023 : hal : 319-328 http://dx.doi.org/10.25105/j

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2021				et.v3i1.1 5412
4.	Yulia Adella Sari (2021) Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah	• Upah Minimum • Pengangguran	• Kesempatan Kerja • Bantuan Sosial	• Upah minimum mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan • Tingkat pengangguran terbuka mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan • Jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan • Upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan	<i>Equilibrium</i> Volume 10. No. 2. Tahun 2021 Hal 121 - 130
5.	Nuraniah (2019) Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan	• Kesempatan Kerja • Bantuan Sosial	• Pengangguran • Upah Minimum	• Kesempatan kerja memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan • Belanja bantuan sosial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan • Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan • Kesempatan kerja, belanja bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi kemiskinan	JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan Vol. 2 No. 1, 2019, hal 63-75
6.	Deby Oktaviana, Wiwin Priana Primandhana, dan Mohammad Wahed (2021) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten,	• Upah Minimum • Pengangguran	• Kesempatan Kerja • Bantuan Sosial	• Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan • Upah minimum kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan • Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan • Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten,	<i>Syntax Idea</i> : p-ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 5, Mei 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dan Pengangguran, Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Madiun			dan Pengangguran berimbas positif terhadap Kemiskinan	
7.	Siti Khalimatus Sangadah, Lorentino Togar Laut, dan Gentur Jalunggono (2020) Pengaruh Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2018	• Bantuan Sosial	• Pengangguran • Kesempatan kerja • Upah minimum	• Inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan • Penerima bantuan sosial rastra memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan • Rata-rata pengeluaran perkapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan • Ada pengaruh signifikan antara inflasi, jumlah penerima bantuan sosial rastra, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan	<i>DINAMI C : Directory Journal of Economic</i> Volume 2 Nomor 1
8.	Nola Putri, Yeniwati, dan Muhammad Irfan (2023) Pengaruh Bantuan Sosial dan Zakat terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat	• Bantuan Sosial	• Pengangguran • Kesempatan Kerja • Upah minimum	• Bantuan sosial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan • Zakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan • Bantuan sosial dan zakat berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan	Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan Volume 12, Nomor 2, November 2023
9.	Toto Mahendra & Juandi (2024) Dampak Tingkat Pengangguran, Kesempatan Kerja, Upah Minimum, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Kota Makassar	• Pengangguran • Kesempatan Kerja • Upah Minimum	• Bantuan Sosial	• Tingkat pengangguran terbuka secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan • Kesempatan kerja yang bekerja secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan • Upah minimum regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan • Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan	<i>Bulletin of Economic Studies (BEST)</i> Volume 4, Nomor 1, (2024). pp. 58-72 https://doi.org/10.24252/best.v4i1.47533

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Regina Kezia Rahayu Syahputri (2023) Pengaruh Pengangguran, Upah Minimum, Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur	• Pengangguran • Upah Minimum	• Kesempatan Kerja • Bantuan sosial	• Pengangguran mempunyai pengaruh signifikan serta positif pada kemiskinan • Upah minimum memberi pengaruh signifikan serta positif pada kemiskinan • PDRB memberi pengaruh signifikan serta negatif pada kemiskinan • Pengangguran, upah minimum, dan PDRB berpengaruh simultan serta signifikan pada kemiskinan	INDEPE NDENT : <i>Journal Of Economics E-ISSN</i> : 2798-5008 Page 169-184 Vol. 2 Nomor 2 2022
11.	Lorenzo Lamas (2021) Pengaruh Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Jambi	• Kesempatan Kerja	• Pengangguran • Upah Minimum • Bantuan Sosial	• kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan • Kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan • Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat kemiskinan.	<i>Science of Management and Students Research Journal</i> , 3(4), Desember 2021, Universitas Batanghari
12.	Siti Hanifah (2021) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan	• Upah Minimum • Pengangguran	• Kesempatan Kerja • Bantuan Sosial	• Perkembangan ekonomi memengaruhi secara negatif signifikan terhadap kemiskinan • Upah minimum memengaruhi negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan • Pengangguran terbuka berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan • Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran secara bersama-sama memengaruhi signifikan terhadap kemiskinan	INDEPE NDENT : <i>Journal Of Economics E-ISSN</i> : 2798-5008 Page 191-206 Vol. 1 Nomor 3 2023
13.	Lisa Agustin & Hadi Sumarsono (2022) Pengaruh Pengangguran, IPM, Dan	• Pengangguran • Bantuan Sosial	• Kesempatan kerja • Upah minimum	• Pengangguran mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan • IPM menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan	Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri Vol. 7 No. 2 Tahun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur			• Bantuan sosial yang dipresentasikan oleh jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak terdapat hubungan yang pengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan	2022
14	Rahmaniar Zulfana Putri & Muhammad Effendi (2021) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Bantuan Sosial dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarmasin	• Kesempatan Kerja	• Pengangguran • Upah Minimum • Bantuan Sosial	• Pertumbuhan ekonomi, belanja bantuan sosial dan kesempatan kerja secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kemiskinan • Kesempatan kerja menunjukkan pengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap kemiskinan • Belanja bantuan sosial menunjukkan pengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap kemiskinan • Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan	JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 4 No. 2, 2021, hal 356-366
15.	Ardi Sulistiawan (2023) Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Pulau Jawa	• Upah Minimum • Pengangguran	• Kesempatan Kerja • Bantuan Sosial	• Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskina • PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin • Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan • Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dan Tingkat Pengangguran secara simultan memengaruhi kemiskinan.	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 7, No. 1, Februari 2023, pp. 115~126
16.	John McCarthy, Gerben Nooteboom, Shaummil Hadi, Pande Made Kutanegara & Nulwita Muliati (2023) <i>The Politics of Knowledge and Social</i>	• Bantuan Sosial	• Pengangguran • Kesempatan kerja • Upah minimum	Transfer tunai bersyarat (CCT) memberikan solusi sementara untuk gejala kemiskinan dengan memberikan uang kepada orang miskin, tetapi tidak mengatasi akar penyebab struktural kemiskinan. Meskipun Meksiko, pelopor CCT di Amerika Latin, telah menjalankan program ini selama dua dekade, tingkat kemiskinan tidak berubah, menunjukkan keterbatasan	<i>Journal of Contemporary Asia</i> ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: www.tandfonline .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Cash Transfers: The Constitutive Effects of an Anti-Poverty Regime in Indonesia</i>			CCT tanpa reformasi struktural yang pro-rakyat.	com/journals/tjoc 20
17.	Maria Vaalavuo & Outi Sirniö (2022) <i>Jobs against poverty: a fixed-effects analysis on the link between gaining employment and exiting poverty in Europe</i>	• Kesempatan Kerja • Pengangguran	• Upah minimum • Bantuan sosial	Peran pekerjaan dalam mengentaskan kemiskinan di Eropa dengan mengamati individu miskin yang menganggur dan tidak aktif di 30 negara di Eropa. Meskipun pengangguran memiliki resiko kemiskinan yang lebih tinggi, pekerjaan tidak selalu menjamin keluar dari kemiskinan, terlihat dari meningkatnya kemiskinan dalam pekerjaan di Eropa dalam beberapa tahun terakhir.	<i>European Societies</i> ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: www.tandfonline.com/journals/reus 20
18.	Ihsaan Bassier & Vimal Ranchhod (2024) <i>Can Minimum Wages Effectively Reduce Poverty under Low Compliance? A Case Study from the Agricultural Sector in South Africa</i>	• Upah minimum	• Pengangguran • Kesempatan kerja • Bantuan sosial	Dampak jangka pendek dari kenaikan besar upah minimum di sektor pertanian Afrika Selatan, yang menunjukkan peningkatan pendapatan rumah tangga per orang dan penurunan kemiskinan di berbagai tingkat tanpa bukti dampak pengangguran.	<i>Review of Political Economy</i> ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: www.tandfonline.com/journals/crpe 20

3.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti yang memengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan menguji empat variabel. Empat variabel ini dipilih berdasarkan teori dari pendapat para ahli. Variabel tersebut adalah pengangguran, upah minimum, kesempatan kerja, dan bantuan sosial.

2.2.1 Hubungan Pengangguran dengan Kemiskinan

Pengangguran memiliki kaitan yang erat dengan tingkat kemiskinan. Ketika pengangguran mengalami kenaikan akan mengurangi kemakmuran hidup masyarakat melalui berkurangnya pendapatan masyarakat yang akan mempunyai kecenderungan untuk meningkatnya kemiskinan. Artinya semakin tinggi pengangguran akan berdampak pada peningkatan kemiskinan. Oleh karena itu, pengangguran menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

Apabila tingkat kesejahteraan masyarakat menurun karena disebabkan oleh tingginya angka pengangguran dapat dipastikan masyarakat akan terjebak ke dalam kemiskinan, karena tidak memperoleh pendapatan. Jika angka pengangguran di sebuah negara tidak bisa dikendalikan maka akan menimbulkan efek buruk seperti kekacauan politik dan sosial, kesejahteraan masyarakat menurun, dan menghambat pembangunan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawan (2023) menyimpulkan bahwa pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sari, (2021) menyimpulkan pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Ashari & Athoillah, (2023) menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan memiliki pengaruh signifikan positif. Penelitian yang dilakukan oleh Lavenia et al., (2023) menyimpulkan pengangguran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Syahputri & Fisabilillah, (2023) menyimpulkan pengangguran mempunyai pengaruh signifikan serta positif pada kemiskinan.

Hal ini menunjukkan bahwa secara langsung peningkatan pengangguran bisa meningkatkan tingkat kemiskinan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengangguran memang sangat bisa memicu meningkatnya angka kemiskinan karena sumber utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya adalah dari penghasilan dan apabila masyarakat tersebut tidak mempunyai pekerjaan maka masyarakat tersebut akan menjadi beban daerahnya dan negaranya.

2.2.2 Hubungan Upah Minimum dengan Kemiskinan

Tujuan dari adanya upah minimum adalah usaha untuk menyejahterakan masyarakat yang berpendapatan rendah. Menurut teori Nurkse dalam Salsabilla et al (2022) upah yang rendah akan memengaruhi kemampuan untuk menabung. Tidak adanya tabungan masyarakat miskin akan sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga akan menyebabkan kemiskinan.

Menurut Kaufman (2000) dalam Islami & Anis (2019) tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga akan mengurangi angka kemiskinan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara upah minimum dengan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Faadihilah, G. et al., (2023) menemukan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Deby, (2021) menemukan bahwa upah minimum

kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah, (2021) menemukan bahwa upah minimum memengaruhi negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawan, (2023) menemukan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Upah minimum menjadi solusi untuk masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan kesejahteraan pekerja. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan.

2.2.3 Hubungan Kesempatan Kerja dengan Kemiskinan

Arsyad (2010) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara kesempatan kerja dengan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ummah, (2019) menyimpulkan bahwa variabel tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Lorenzo, (2021) menyimpulkan bahwa kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Sisca et al., (2013) menemukan bahwa kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian yang dilakukan oleh (Padang et al., 2025) menyimpulkan bahwa kesempatan kerja memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian yang dilakukan Tiovanni, (2021) menyimpulkan bahwa kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Peningkatan kesempatan kerja akan menurunkan tingkat kemiskinan, begitupun sebaliknya penurunan kesempatan kerja akan meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan kerja akan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi angkatan kerja, tersedianya lapangan kerja akan berdampak terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan penduduk dan selanjutnya secara otomatis akan berdampak terhadap penurunan kemiskinan.

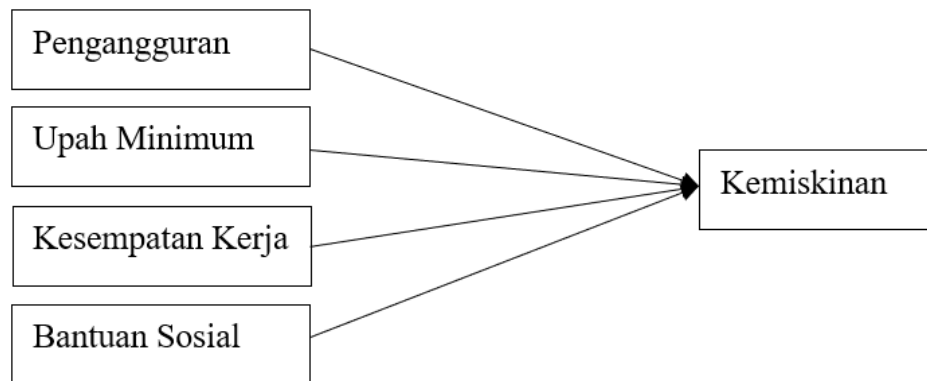
2.2.4 Hubungan Bantuan Sosial dengan Kemiskinan

Menurut Todaro (2003) bantuan sosial maupun subsidi pangan yang dibagikan kepada daerah-daerah pinggiran atau masyarakat miskin adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah yang dapat secara langsung untuk tujuan dapat menjaga harga bahan makanan pokok yang tetap rendah salah satu kebijakan penting yang menyeluruh yang dapat menanggulangi masalah tingkat kemiskinan

adalah dengan cara pembiayaan konsumsi barang ataupun jasa bagi kelompok penduduk yang sangat miskin.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurainah (2019) menemukan bahwa hasil regresi menyatakan bantuan sosial mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Awaliyah, et al., (2024) menemukan bahwa bantuan sosial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rarun et al., (2018) menemukan bahwa bantuan sosial berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fadhli, (2023) menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari adanya BPNT terhadap penanggulangan kemiskinan di desa Pucangsimo. Pada penelitian yang dilakukan oleh Takasaping et al., (2023) menemukan bahwa bantuan sosial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kepulauan Sangihe. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi bantuan sosial sudah tepat sasaran kepada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan sehingga membantu mereka dalam pemulihan perekonomian.

Berdasarkan teori yang telah diteliti terdahulu maka didapatkan kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

3.3 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2019), adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan hubungan antara variabel dalam kerangka pemikiran, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial pengangguran berpengaruh positif, sedangkan upah minimum, kesempatan kerja, dan bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Diduga secara bersama-sama, pengangguran, upah minimum, kesempatan kerja, dan bantuan sosial berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.